BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di balik kemajuan pembangunan perkotaan yang terus digaungkan pemerintah, terdapat kelompok masyarakat yang justru semakin terpinggirkan. Mereka adalah warga berpenghasilan rendah yang selama ini menggantungkan hidup pada lahan yang mereka tempati, dan kini harus berhadapan dengan tekanan pembangunan yang datang menggeser ruang hidup mereka. Proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang hadir di tengah kawasan permukiman warga kerap menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak selalu tertangani secara memadai dalam proses perencanaannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terakhir diperbarui Februari 2026, mencatat bahwa kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.142 jiwa per kilometer persegi.[1] Hal tersebut menjadikannya salah satu kawasan metropolitan terpadat di Asia Tenggara yang terus menghadapi persaingan penggunaan lahan dari berbagai kepentingan secara bersamaan. Dalam konteks kota yang sepadat ini, kehadiran proyek pembangunan skala besar hampir selalu bersinggungan langsung dengan kehidupan warga yang telah lebih dahulu menempati kawasan tersebut, sering kali tanpa kepastian hukum atas lahan yang mereka diami. Persaingan kepentingan antara agenda pembangunan kota dan hak sosial warga pun menjadi persoalan struktural yang tidak mudah diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif semata, dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan.

Fenomena penggusuran dan relokasi paksa bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung dalam pola yang berulang dan terdokumentasi sepanjang beberapa dekade. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) LBH Jakarta tahun 2022 yang berjudul

---

[1] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta," https://jakarta.bps.go.id/id/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk

"Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki" mencatat setidaknya 13 kasus penggusuran paksa yang terekam dalam sistem pengaduan lembaga tersebut sepanjang tahun 2022 saja, menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung secara konsisten di berbagai sudut kota.[2] Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui dokumen bersama UN-Habitat dan OHCHR berjudul *Forced Evictions: Fact Sheet No. 25/Rev.1* (2014) menegaskan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap serangkaian hak asasi manusia, termasuk hak atas perumahan yang layak, hak atas pangan, dan hak atas pekerjaan yang bermartabat.[3] Lebih jauh, dokumen tersebut menekankan bahwa perpindahan paksa yang tidak disertai mekanisme perlindungan sosial yang memadai serta pemulihan nafkah yang nyata merupakan salah satu pemicu utama terperangkapnya masyarakat dalam kemiskinan perkotaan yang bersifat struktural dan sulit dientaskan. Dampak dari penggusuran tidak hanya bersifat material berupa kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mencabut ikatan sosial, jaringan ekonomi, serta identitas komunitas yang telah terbentuk selama bertahun-tahun di satu lokasi.

Kasus yang secara gamblang mencerminkan dinamika tersebut adalah relokasi komunitas petani yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. JIS merupakan stadion olahraga berkapasitas besar yang dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari agenda pengembangan kawasan olahraga dan hiburan bertaraf internasional. Pembangunan stadion tersebut membutuhkan penggunaan lahan yang selama puluhan tahun sudah ditempati dan dimanfaatkan oleh sekelompok warga petani yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian di kawasan tersebut secara turun-temurun. Kegiatan pertanian yang mereka jalankan bukan semata-mata sebagai pilihan

---

[2] Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki: Catatan Akhir Tahun 2023* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2023), hlm. 27.

[3] United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Forced Evictions: Fact Sheet No. 25/Rev.1* (New York dan Geneva: United Nations, 2014), hlm. 5–6.

ekonomi, melainkan juga merupakan warisan budaya dan identitas kolektif yang telah mengakar kuat dari generasi ke generasi. Sebelum terjadinya proses penggusuran, komunitas ini tidak dibebani kewajiban membayar sewa lahan maupun biaya hunian yang berarti, karena mereka memanfaatkan lahan negara yang secara *de facto* telah menjadi bagian dari kehidupan mereka tanpa adanya klaim aktif dari pihak lain, dan di atas lahan seluas sekitar 26,5 hektare itulah mereka mampu menghasilkan berbagai komoditas sayuran yang dipasarkan hingga ke Pasar Induk Kramat Jati dan jaringan pedagang di sekitar Jakarta.[4]

Perjalanan relokasi Kelompok Tani Kampung Bayam Madani berlangsung panjang dan berlapis, melewati beberapa babak yang masing-masing membawa tekanan tersendiri bagi komunitas ini. Penggusuran pertama yang mereka alami terjadi pada tahun 2008 hingga 2009, yang kemudian mendorong para petani untuk berkonsolidasi dan membentuk kelompok tani secara resmi pada tanggal 20 November 2009 sebagai bentuk respons kolektif terhadap tekanan yang datang dari luar. Ketika proyek pembangunan JIS semakin intensif dan mulai menyentuh lahan pertanian yang mereka garap, komunitas kembali harus berpindah dan menjalani masa tinggal di Hunian Sementara (Huntara) selama kurang lebih tiga tahun dalam kondisi yang penuh keterbatasan fasilitas. Pada tanggal 14-28 Agustus 2025, sebanyak 35 kepala keluarga yang bertahan akhirnya secara resmi menempati Rusun HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional) yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, yang dibangun dan dikelola oleh PT Jakpro sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap komunitas terdampak. Rusun ini pada mulanya direncanakan sebagai Kampung Susun Bayam di bawah masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, namun seiring pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nama dan orientasi pengelolaan hunian ini berubah menjadi Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) dengan pendekatan yang lebih bersifat korporatif, dan hingga saat penelitian ini dilakukan, kesepakatan tertulis

[4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 33.

mengenai mekanisme sewa antara warga dan pihak pengelola belum disepakati secara resmi.

Perubahan status hunian dari lahan yang secara *de facto* bebas biaya menjadi unit rusun yang terikat oleh kewajiban administratif merupakan salah satu perubahan paling fundamental yang dirasakan oleh warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pasca relokasi ke HPPO. Selama puluhan tahun menghuni kawasan di sekitar Papanggo, komunitas ini tidak pernah mengenal beban sewa bulanan dalam struktur pengeluaran rumah tangganya, sehingga seluruh penghasilan dari pertanian dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, bibit, pupuk, dan kebutuhan hidup sehari-hari secara lebih leluasa. Kini di HPPO, meskipun biaya listrik dan air untuk sementara masih ditanggung pihak pengelola, kepastian keberlanjutan subsidi tersebut belum diatur secara tertulis, sehingga warga berada dalam kondisi ketidakpastian ganda antara belum adanya perjanjian sewa yang disepakati dan ancaman biaya hidup yang sewaktu-waktu dapat bertambah secara signifikan. Kondisi transisi ini menempatkan anggota kelompok tani pada posisi yang semakin tertekan secara ekonomi, terutama ketika mereka harus menyeimbangkan antara tanggung jawab pertanian kolektif di lahan komunal yang jauh lebih sempit dan kebutuhan untuk mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan di luar sektor pertanian. Hal ini pada gilirannya membentuk pola diversifikasi pekerjaan yang kompleks di antara anggota komunitas, di mana sebagian menjalani pekerjaan serabutan seperti kuli panggul, tukang bangunan, atau pedagang kecil, sebagai penopang ekonomi keluarga di tengah keterbatasan hasil pertanian yang tersedia.

Penyusutan kapasitas pertanian yang sangat drastis menjadi salah satu persoalan paling nyata yang dihadapi komunitas ini pasca relokasi. Dari lahan seluas sekitar 26,5 hektare di Kampung Bayam lama, kini kelompok hanya memiliki akses terhadap lahan pertanian komunal seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Rusun HPPO, sebuah penyusutan yang tidak sebanding dan secara langsung memukul kapasitas produksi serta pendapatan kelompok dari sektor pertanian. Kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari tren yang jauh lebih luas yang

mencerminkan semakin tersisihnya pertanian dari lanskap perkotaan Jakarta. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi DKI Jakarta tercatat hanya sebanyak 13.416 unit, menjadikannya provinsi dengan jumlah UTP paling sedikit di seluruh Indonesia, yakni hanya mencakup 0,05 persen dari total UTP nasional yang berjumlah 29.342.202 unit.[5] Secara nasional, jumlah UTP telah mengalami penurunan sebesar 7,42 persen atau setara 2,35 juta unit dalam kurun satu dekade antara 2013 dan 2023, menandakan bahwa tekanan alih fungsi lahan dan urbanisasi telah menggerus basis pertanian perorangan secara konsisten dan berkelanjutan. Data dan gambaran statistis mengenai kondisi ini tersaji dalam infografis berikut.

Gambar 1. 1 Data Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Pertanian DKI Jakarta dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Di tengah tekanan tersebut, pertanian perkotaan justru semakin mendapatkan perhatian sebagai salah satu strategi adaptasi komunitas berpenghasilan rendah di kota-kota besar dunia. Bagi komunitas seperti Kelompok Tani Kampung Bayam Madani,

[5] Badan Pusat Statistik, "Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap I," https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html

bertani bukan semata-mata soal menghasilkan uang dari penjualan sayuran, melainkan juga soal mempertahankan cara hidup, nilai-nilai gotong royong, dan jati diri sebagai komunitas petani yang telah mewariskan tradisi ini lintas generasi. Kegiatan bertani secara kolektif menjadi perekat sosial yang menjaga kohesi komunitas, di mana setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga terhadap keberlangsungan kelompok secara keseluruhan. Dalam kondisi inilah peralihan paksa dari kawasan pertanian luas ke lahan komunal yang sangat terbatas di lingkungan rusun tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi identitas dan solidaritas sosial komunitas secara mendalam.

Tantangan yang dihadapi komunitas ini tidak berhenti pada persoalan lahan dan pendapatan, tetapi meluas hingga ke dimensi adaptasi sosial yang terjadi ketika sebuah komunitas dengan tradisi gotong royong yang kuat dan terbiasa hidup secara horizontal di kampung dipindahkan ke dalam hunian vertikal yang memiliki sistem tata kelola dan norma sosial yang berbeda. Hunian vertikal seperti rusun menuntut penghuni untuk menyeimbangkan antara hak individual atas unit hunian dan tanggung jawab kolektif atas fasilitas bersama, sebuah pola sosial yang sangat berbeda dari kehidupan komunal di kampung yang selama ini tidak memerlukan batas-batas administratif yang ketat dalam mengatur penggunaan ruang dan sumber daya bersama. Turner dalam esainya menegaskan bahwa kualitas sebuah hunian tidak cukup hanya diukur dari standar fisik bangunannya, melainkan harus dilihat dari sejauh mana hunian tersebut mampu mendukung dan memfasilitasi kehidupan, produktivitas, dan kesejahteraan penghuninya secara aktif.[6] Dalam kerangka ini, penyediaan lahan pertanian komunal di kawasan HPPO oleh pihak pengelola dapat dibaca sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan sosial kelompok tani, namun pertanyaan tentang seberapa jauh

[6] John F. C. Turner, "Housing as a Verb," dalam *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*, ed. Robert Fichter (New York: Macmillan, 1972), hlm. 148–175.

akomodasi ini benar-benar mampu memulihkan kapasitas penghidupan komunitas yang terdampak tetap perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian yang sistematis.

Kebijakan perumahan bagi kelompok masyarakat terdampak pembangunan, termasuk yang diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, secara normatif memang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan rusun harus mencakup tidak hanya aspek fisik hunian, tetapi juga peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan huniannya.[7] Namun dalam praktiknya, kebijakan relokasi ke hunian vertikal di berbagai konteks perkotaan Indonesia kerap menunjukkan kecenderungan yang lebih berfokus pada penyediaan unit fisik sebagai ukuran keberhasilan program, tanpa diikuti oleh mekanisme pemulihan nafkah yang terencana dan berkelanjutan bagi warga yang kehidupan ekonominya terganggu akibat perpindahan. Bagi komunitas petani yang identitas dan penghidupannya secara langsung terikat pada ketersediaan lahan, keterbatasan akses terhadap lahan pertanian setelah relokasi bukan sekadar persoalan teknis pertanian, melainkan merupakan persoalan eksistensial yang menyangkut keberlangsungan cara hidup dan sumber penghidupan utama. Kondisi inilah yang menjadikan kasus Kelompok Tani Kampung Bayam Madani di Rusun HPPO sebagai cerminan dari kesenjangan yang masih ada antara apa yang dijanjikan oleh kebijakan relokasi dan apa yang sesungguhnya dialami oleh komunitas terdampak di lapangan.

Sebagai respons pragmatis terhadap sempitnya lahan pertanian dan ketidakpastian penghasilan dari sektor tani, anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang kini bermukim di HPPO pada kenyataannya telah menjalani pola diversifikasi mata pencaharian yang cukup beragam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sejumlah anggota bekerja sebagai kuli panggul, tukang bangunan atau buruh konstruksi, dan pedagang kecil-kecilan, sementara sebagian lainnya mencoba mengembangkan produk olahan berbahan baku hasil pertanian seperti keripik bayam dan minuman herbal bir pletok sebagai sumber penghasilan tambahan, meskipun upaya

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 1 ayat (7).

ini masih terkendala modal dan akses pasar yang terbatas. Kegiatan bertani di lahan komunal HPPO kini lebih berperan sebagai penyedia pangan subsisten dan pemelihara identitas kelompok daripada sebagai sumber pendapatan utama, sehingga struktur penghidupan komunitas ini telah bertransformasi menjadi jauh lebih kompleks dan berlapis dibandingkan masa sebelum relokasi ketika pertanian masih dapat menjadi andalan ekonomi rumah tangga. Transformasi ini menghadirkan pertanyaan sosiologis yang penting mengenai bagaimana komunitas petani kota menyusun ulang strategi penghidupannya di tengah keterbatasan aset, perubahan ruang hidup, dan tekanan ekonomi perkotaan yang terus meningkat, sebuah pertanyaan yang membutuhkan analisis mendalam menggunakan kerangka konseptual yang tepat, yakni *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) yang dikembangkan oleh Chambers dan Conway.

Literatur yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang hanya berfokus pada pemindahan fisik tanpa disertai pemulihan kapasitas penghidupan warga terdampak cenderung menghasilkan kondisi kemiskinan baru yang justru lebih sulit untuk diatasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sarina La Opi, Sahrony A. Hirto, dan Muhamad Jani terhadap masyarakat Kawasi yang direlokasi akibat ekspansi pertambangan nikel menemukan bahwa proses relokasi yang bersifat *top-down* dan minim partisipasi publik terbukti gagal memulihkan keberlanjutan mata pencaharian warga, khususnya kalangan nelayan dan petani yang seluruh basis ekonominya terikat pada lingkungan asal mereka. Fasilitas ekonomi yang disediakan di lokasi baru, seperti pasar dan sentra pertanian, belum berfungsi secara optimal, sementara kepastian kepemilikan lahan tetap tidak jelas dan program pemberdayaan dari perusahaan belum mampu meningkatkan kapasitas ekonomi warga secara nyata. Penelitian tersebut menegaskan bahwa relokasi tidak cukup hanya memindahkan masyarakat secara fisik, melainkan harus dibarengi perencanaan sosial-ekonomi yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan agar benar-benar menjadi katalisator kesejahteraan bagi komunitas terdampak. Temuan ini sangat relevan dengan situasi Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, di mana penyediaan hunian baru di HPPO

belum sepenuhnya diiringi oleh mekanisme pemulihan nafkah yang terencana dan berkelanjutan.[8]

Pada skala yang lebih luas, penelitian internasional yang dilakukan oleh Dereje Kebede dan Girmay Tesfay terhadap rumah tangga yang terdampak akibat pengambilalihan lahan untuk investasi pertanian skala besar di Ethiopia memberikan gambaran empiris yang sangat kuat mengenai betapa destruktifnya dislokasi lahan terhadap kondisi ekonomi komunitas terdampak. Temuan ini secara tegas menunjukkan bahwa kehilangan akses terhadap lahan tidak hanya berdampak pada penghasilan jangka pendek, tetapi juga menggerus akumulasi aset yang dibangun selama bertahun-tahun oleh rumah tangga yang bersangkutan. Kondisi serupa dapat dengan mudah diidentifikasi dalam kasus komunitas petani di Kampung Bayam Madani, di mana penyusutan lahan secara langsung memukul kapasitas produksi dan pendapatan kelompok dari sektor pertanian.[9] Kedua temuan dari literatur tersebut secara bersama-sama memperkuat argumen bahwa proses adaptasi ekonomi pasca relokasi tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah tanpa intervensi kebijakan yang terencana, dan inilah celah yang ingin dijawab oleh penelitian ini melalui analisis mendalam terhadap transformasi mata pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan kondisi kemiskinan perkotaan yang masih menjadi tantangan serius di DKI Jakarta. BPS mencatat bahwa pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta berada di angka 4,30 persen atau setara dengan sekitar 464,93 ribu jiwa, dan sebagian dari mereka adalah warga yang kondisi penghidupannya terganggu akibat proses pembangunan

---

[8] Sarina L. O., Sahrony A. H., Muhamad J. "Relokasi dari desa lama ke ecovillage demi kesejahteraan berkelanjutan masyarakat Kawasi", *JADMENT: Journal of Administration & Development, 2 (3),* 2025: *372–382.*

[9] Dereje K., Girmay T., Bezabih E, "Impact of land acquisition for large-scale agricultural investments on income and asset possession of displaced households in Ethiopia", *Heliyon,* 7, 2021: 1–13.

kota yang tidak disertai jaring pengaman sosial yang memadai.[10] Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana komunitas seperti Kelompok Tani Kampung Bayam Madani bertahan dan beradaptasi secara ekonomi pasca relokasi, kebijakan-kebijakan serupa di masa mendatang berisiko untuk terus mengulang pola yang sama, yakni memindahkan warga secara fisik tanpa benar-benar memulihkan kapasitas penghidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menghadirkan gambaran empiris yang kaya tentang transformasi mata pencaharian komunitas tani di lingkungan rusun, serta memberikan kontribusi nyata bagi para pembuat kebijakan, pengelola rusun, dan akademisi dalam merancang pendekatan relokasi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan penghidupan warga terdampak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik dan ingin mengkaji mata pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pasca menempati Rusun HPPO di area JIS, Papanggo, Jakarta Utara dalam konteks transformasi penghidupan komunitas tani yang dihadapkan pada keterbatasan lahan, ketidakpastian status hunian, dan tekanan ekonomi perkotaan yang semakin kompleks. Dengan mengidentifikasi perubahan mata pencaharian kelompok tani ini melalui analisis *Sustainable Livelihood Framework*, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi sejauh mana proses relokasi yang disertai penyediaan fasilitas pertanian komunal benar-benar mampu mendukung keberlanjutan penghidupan warga secara nyata dan terukur. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul *"Mata Pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Pasca Menempati Rusun Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di Area JIS Papanggo Jakarta Utara"*

[10] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Persen)," https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTEyNSMy/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html

1.2 Permasalahan Penelitian

Berangkat dari dinamika yang telah diuraikan, relokasi Kelompok Tani Kampung Bayam Madani ke Rusun HPPO tidak hanya menghadirkan perubahan fisik tempat tinggal, tetapi juga memunculkan persoalan yang lebih mendasar terkait keberlanjutan penghidupan komunitas. Penyusutan lahan pertanian, ketidakpastian status hunian, serta meningkatnya tekanan ekonomi perkotaan mendorong terjadinya pergeseran pola mata pencaharian dari yang semula berbasis pertanian menjadi semakin beragam dan tidak stabil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana Kelompok Tani Kampung Bayam Madani mampu menyesuaikan diri dan menyusun kembali strategi penghidupannya di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami transformasi mata pencaharian yang terjadi serta sejauh mana relokasi ke Rusun HPPO dapat mendukung atau justru membatasi keberlanjutan penghidupan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mata pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pasca menempati rusun Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di area JIS Papanggo Jakarta Utara?
2. Bagaimana *Sustainable Livelihood* pada Kelompok Tani Kampung Bayam Madani di Rusun Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS Papanggo Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mata pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pasca menempati rusun Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di area JIS Papanggo Jakarta Utara.

2. Mendeskripsikan *Sustainable Livelihood* pada Kelompok Tani Kampung Bayam Madani di Rusun Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS Papanggo Jakarta Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, relokasi, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat urban. Dengan menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihood Framework*, penelitian ini juga dapat memperkaya referensi akademik mengenai bagaimana kelompok tani beradaptasi terhadap perubahan ruang hidup dan sumber daya setelah menempati hunian vertikal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik mengkaji isu relokasi, keberlanjutan mata pencaharian, dan dinamika kehidupan masyarakat perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi mata pencaharian kelompok tani pasca menempati rusun HPPO di area JIS, Papanggo. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pengelola rusun dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendukung keberlanjutan mata pencaharian warga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi refleksi bagi berbagai pihak agar proses relokasi tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Penelitian ini disusun dengan bertumpu pada kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan isu perubahan mata pencaharian, relokasi hunian, serta strategi keberlanjutan nafkah masyarakat pasca perpindahan tempat tinggal. Penelusuran pustaka dilakukan untuk memahami bagaimana penelitian terdahulu membahas dinamika ekonomi rumah tangga, diversifikasi pekerjaan, serta proses adaptasi kelompok tani ketika menghadapi perubahan ruang hidup dan struktur kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Tinjauan literatur ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, khususnya dalam penggunaan Sustainable Livelihood Framework sebagai alat analisis, tetapi juga untuk memetakan posisi penelitian dalam studi sosiologi mengenai transformasi sosial ekonomi masyarakat terdampak relokasi. Dengan demikian, kajian terhadap jurnal nasional dan internasional yang relevan menjadi penting untuk memperkuat kerangka analisis, menemukan celah penelitian, serta memastikan kontribusi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Skema 1. 1 Tinjauan Literatur Sejenis

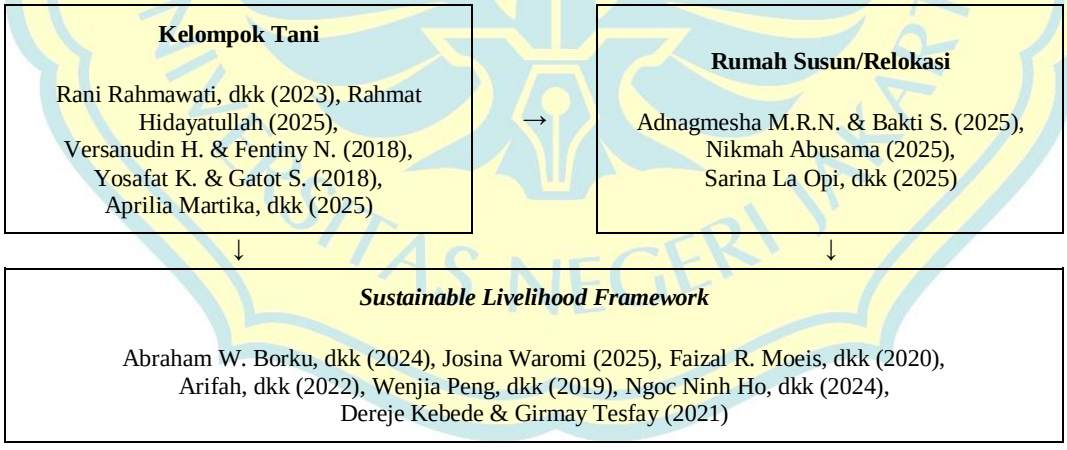

Sumber : Olah data peneliti, 2026

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rani Rahmawati, August E. Pattiselanno, dan Noviar Flasiana Wenno berjudul *"Strategi Nafkah Rumahtangga*

Petani di Desa Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah".[11] Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen terhadap 40 rumah tangga petani. Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi nafkah rumah tangga petani serta pemanfaatan modal rumah tangga dalam menghadapi krisis gagal panen. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori *Sustainable Livelihood Framework* serta klasifikasi strategi nafkah, yang membagi strategi menjadi *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*, serta menekankan pada lima *livelihood assets* yaitu modal alam, manusia, sosial, finansial, dan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian padi sawah, tetapi melakukan diversifikasi pekerjaan ke sektor hortikultura, buruh tani, perdagangan, jasa, hingga migrasi kerja sebagai bentuk pola nafkah ganda dan rekayasa spasial. Temuan ini menegaskan bahwa strategi nafkah yang beragam menjadi bentuk resiliensi rumah tangga petani dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah ketidakstabilan hasil pertanian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayatullah berjudul *"Strategi Bertahan Hidup Petani Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Komoditas"*.[12] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta pemilihan informan secara *purposive* yang meliputi petani kecil, petani penggarap, dan petani pemilik lahan dengan komoditas rentan terhadap gejolak harga. Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi adaptasi dan bertahan hidup petani dalam menghadapi ketidakpastian harga komoditas yang berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan usaha tani. Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada konsep strategi bertahan hidup *(livelihood strategy)* masyarakat pedesaan serta pemanfaatan modal sosial sebagai penyangga ekonomi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani

---

[11] Rani R., August E. P., Noviar F. W., "Strategi nafkah rumahtangga petani di Desa Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah", *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 6 (1), 2023: 17–32. https://doi.org/10.30598/komunitasvol6issue1page17-32

[12] Rahmat H., "Strategi bertahan hidup petani dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas", *Jurnal Economina*, 4 (1), 2025: 25–42.

menerapkan strategi ekonomi seperti diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi biaya produksi, diversifikasi tanaman, serta penjualan hasil panen secara bertahap, yang dipadukan dengan strategi sosial melalui gotong royong, pinjaman informal, dan penguatan jaringan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan rumah tangga petani dalam menghadapi fluktuasi harga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial dan dukungan kelembagaan di tingkat lokal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho berjudul *"Pola Penguasaan Tanah dan Distribusi Kesejahteraan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Timur"*.[13] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Kedungprimpen untuk menganalisis pola penguasaan tanah serta kaitannya dengan distribusi kesejahteraan rumah tangga dan bentuk diversifikasi nafkah. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur kepemilikan dan penguasaan tanah (melalui sistem milik, bagi hasil/maro, sewa, dan gadai), sistem perburuhan pertanian, serta bagaimana diferensiasi sosial terbentuk akibat ketimpangan akses terhadap lahan. Dalam analisisnya, penelitian ini merujuk pada konsep diferensiasi sosial (Husken) dan *Sustainable Livelihoods Framework* (Scoones) yang menekankan lima modal nafkah, yakni modal alam, fisik, manusia, finansial, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga berada dalam kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,25 Ha sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian mendorong mereka melakukan diversifikasi nafkah pada sektor pertanian (buruh tani, bagi hasil, sewa) maupun nonpertanian (perdagangan, kerajinan, peternakan, pertukangan). Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan tanah berkontribusi pada diferensiasi sosial di pedesaan serta membentuk strategi nafkah rumah tangga sebagai

[13] Versanudin H., Fentiny N., "Pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah tangga di pedesaan Jawa Timur", *Bhumi*, 4 (1), 2018: 40–52. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.206

upaya mempertahankan kesejahteraan di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yosafat Kotalaha dan Gatot Sasongko berjudul *"Kearifan Lokal 'Makiriwo' dalam Perspektif Sustainable Livelihood (Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia)"*.[14] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana kearifan lokal makiriwo sebagai bentuk gotong royong dimanfaatkan dalam mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, komunikasi, dan pasar. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan *Sustainable Livelihood Framework* dari Chambers dan Conway yang menekankan lima aset penghidupan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal manusia, fisik, dan finansial mendorong petani mengandalkan modal sosial dan modal sumber daya alam sebagai strategi utama bertahan hidup, terutama melalui praktik makiriwo yang memperkuat jejaring, norma, dan kepercayaan dalam proses produksi kopra. Selain itu, petani juga menerapkan strategi nafkah ganda seperti berkebun tanaman lain dan melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi strategi kolektif yang efektif dalam menjaga keberlanjutan mata pencaharian di tengah keterbatasan struktural dan tekanan ekonomi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Martika, Amelia Sari, Disti Macela Putri, dan Misbahul Munir berjudul *"Urban Farming sebagai Solusi Kemandirian Pangan dan Lapangan Kerja Baru di Bangka Belitung (Studi Kasus Kota*

[14] Yosafat K., Gatot S., "Kearifan lokal 'Makiriwo' dalam perspektif sustainable livelihood (Studi kasus petani kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia)", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6 (3), 2018: 252–262.

Pangkalpinang)".[15] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilengkapi analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan *urban farming*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kontribusi *urban farming* terhadap kemandirian pangan, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks perkotaan dengan keterbatasan lahan. Dalam kajian teoretisnya, penelitian ini menggunakan konsep ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memanfaatkan analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* sebagai kerangka strategis pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *urban farming* di Kelurahan Parit Lalang didominasi oleh teknik hidroponik di pekarangan rumah, dengan tujuan utama untuk konsumsi sendiri, pengurangan pengeluaran rumah tangga, serta tambahan pendapatan melalui penjualan skala kecil. Meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal, pengetahuan teknis, dan dukungan pemerintah yang belum berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa *urban farming* memiliki potensi signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru, namun memerlukan strategi pengembangan yang terstruktur dan kolaboratif agar berkelanjutan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Adnagmesha Magfirah Ramadhani Najib dan Bakti Setiawan berjudul *"Studi Komparatif Keterikatan Tempat (Place Attachment) pada Komunitas Relokasi dan In-Situ Pascabencana Likuifaksi di Sulawesi Tengah"*.[16] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis dampak dua skema rekonstruksi perumahan

---

[15] Aprilia M., Amelia S., Disti M. P., dkk., "Urban farming sebagai solusi kemandirian pangan dan lapangan kerja baru di Bangka Belitung (Studi kasus Kota Pangkalpinang)", *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4 (4), 2025: 299–323. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i4.5311

[16] Adnagmesha M. R. N., Bakti S., "Studi komparatif keterikatan tempat (place attachment) pada komunitas relokasi dan in-situ pascabencana likuifaksi di Sulawesi Tengah", *Journal of Urban and Regional Planning*, 4 (2), 2025: 142–156.

pascabencana, yaitu relokasi ke Hunian Tetap (Huntap) dan rekonstruksi in-situ melalui dana stimulan, terhadap pemulihan keterikatan tempat pada Warga Terdampak Bencana (WTB). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap 11 narasumber yang terbagi dalam dua kelompok kasus. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori *place attachment* dari Williams dan Vaske yang membagi keterikatan tempat ke dalam dua dimensi utama, yaitu *place dependence* (ketergantungan fungsional) dan *place identity* (identitas tempat), yang kemudian dielaborasi melalui tema otonomi, ikatan sosial, serta negosiasi antara rasa aman dan trauma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema relokasi berhasil memberikan keamanan fisik dari trauma bencana, namun memutus ikatan fungsional terhadap mata pencaharian agraris dan melemahkan kohesi sosial komunitas. Sebaliknya, skema in-situ mampu mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian dan jaringan sosial, tetapi penyintas harus hidup berdampingan dengan trauma tempat. Temuan ini menegaskan bahwa pilihan kebijakan rekonstruksi tidak hanya berdampak pada aspek fisik hunian, tetapi secara fundamental membentuk ulang dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat pascabencana.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nikmah Abusama berjudul *"Konsep Bermukim Kembali Pasca Relokasi: Studi Kasus Bantaran Sungai Inggoi, Desa Amasing Kota Barat"*.[17] Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang membentuk fenomena kembalinya masyarakat ke lokasi lama pasca relokasi akibat bencana banjir tahun 2010. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 20 responden yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat yang kembali bermukim, serta dokumentasi dan data sekunder dari instansi terkait. Fokus penelitian ini adalah

[17] Nikmah A., "Konsep bermukim kembali pasca relokasi: Studi kasus bantaran Sungai Inggoi, Desa Amassing Kota Barat", *Jurnal Wilayah dan Kota*, 11 (2), 2025: 88–102.

menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang mendorong masyarakat kembali ke bantaran Sungai Inggoi meskipun kawasan tersebut rawan bencana. Dalam analisis teoretisnya, penelitian ini menggunakan konsep *place attachment* dari Williams dan Vaske, teori lingkungan dan perilaku dari Rapoport, serta perspektif sosial-budaya permukiman untuk menjelaskan keterikatan emosional masyarakat terhadap ruang hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan kembali bermukim dipengaruhi oleh ketergantungan pada laut dan sungai sebagai sumber mata pencaharian, kuatnya nilai sejarah dan budaya (konsep "Lipu Saruma"), keterikatan terhadap tanah warisan, serta lemahnya keberlanjutan program relokasi pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa relokasi tidak hanya menyangkut penyediaan hunian fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan keterikatan emosional masyarakat terhadap ruang yang telah membentuk identitas dan keberlangsungan hidup mereka.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sarina La Opi, Sahrony A. Hirto, dan Muhamad Jani berjudul *"Relokasi dari Desa Lama ke Ecovillage demi Kesejahteraan Berkelanjutan Masyarakat Kawasi".*[18] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat Desa Kawasi terkait proses relokasi akibat ekspansi industri pertambangan nikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan masyarakat yang menerima dan menolak relokasi, perangkat desa, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perencanaan relokasi dalam menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui konsep Ecovillage. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka perencanaan transformatif John Friedmann yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemberdayaan dalam proses pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

[18] Sarina L. O., Sahrony A. H., Muhamad J., "Relokasi dari desa lama ke ecovillage demi kesejahteraan berkelanjutan masyarakat Kawasi", *JADMENT: Journal of Administration & Development*, 2 (3), 2025: 372–382.

relokasi cenderung bersifat *top-down*, minim partisipasi publik, serta belum mampu memulihkan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan dan petani. Fasilitas ekonomi seperti pasar dan sentra pertanian belum berfungsi optimal, kepastian kepemilikan lahan belum jelas, dan program CSR belum efektif meningkatkan kapasitas ekonomi warga. Temuan ini menegaskan bahwa relokasi tidak cukup hanya memindahkan masyarakat secara fisik, tetapi harus disertai perencanaan sosial-ekonomi yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan agar benar-benar menjadi katalisator kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Abraham Woru Borku, Abera Uncha Utallo, dan Thomas Toma Tora berjudul *"Determinants of Urban Households in the Diversification of Livelihood Activities: The Case of Wolaita Zone in Southern Ethiopia".*[19] Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan *desain concurrent embedded,* menggabungkan survei kuantitatif terhadap 310 rumah tangga di tiga kota (Areka, Boditi, dan Sodo) serta wawancara mendalam, *Focus Group Discussion*, dan observasi lapangan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi pola aktivitas penghidupan rumah tangga perkotaan serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam diversifikasi mata pencaharian. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (DFID) yang menekankan lima aset penghidupan (modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam) serta teori *Utility Maximization* yang menjelaskan bahwa rumah tangga memilih kombinasi aktivitas penghidupan untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerentanan. Secara kuantitatif, penelitian ini menerapkan model *Multinomial Logit (MNL)* untuk menganalisis determinan pilihan aktivitas seperti *on-farm, non-farm, off-farm,* maupun kombinasi ketiganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi, pelatihan dari agen pembangunan, tingkat pendidikan, kepemilikan rumah, keterampilan teknis, pendapatan, dan keterkaitan desa-kota

[19] Abraham W. B., Abera U. U., Thomas T. T., "Determinants of urban households in the diversification of livelihood activities: The case of Wolaita zone in southern Ethiopia", *Journal of Agriculture and Food Research*, 16, 2024: 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101193

berpengaruh signifikan terhadap keputusan diversifikasi mata pencaharian. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi menjadi strategi penting rumah tangga perkotaan dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi kerentanan, serta memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika urbanisasi.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Josina Waromi berjudul *"Urban People Livelihood Diversification: Strategy and Sustainability".*[20] Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei yang dilakukan pada masyarakat korban tsunami di Kampung Angkasa Mulyono dan Kampung Arowi, Manokwari, Papua Barat, dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, serta tabulasi data kuantitatif pada dua periode penelitian (2014 dan 2024). Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi diversifikasi mata pencaharian masyarakat perkotaan pasca relokasi serta menilai keberlanjutannya dalam jangka panjang. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Framework* dari Chambers dan Conway (1992), Scoones (1998), serta DFID (1999) yang menekankan pada keterkaitan antara aset (modal alam, manusia, fisik, finansial, dan sosial), konteks kerentanan, strategi penghidupan, serta keberlanjutan livelihood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak beralih pada sektor *off-farm* dan *non-farm* seperti nelayan, buruh konstruksi, kuli pelabuhan, ojek, serta perdagangan kecil, dengan strategi utama berupa pemanfaatan aset (kendaraan, tanaman tahunan, tabungan), jaringan pertemanan, serta peluang kerja informal. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan mata pencaharian lebih kuat pada sektor non-pertanian informal, sementara aktivitas *on-farm* cenderung tidak berkelanjutan akibat keterbatasan akses lahan dan konversi lahan menjadi permukiman. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi mata pencaharian menjadi respons adaptif masyarakat miskin perkotaan dalam menghadapi tekanan ekonomi, keterbatasan aset, serta dinamika perubahan ruang pasca relokasi.

---

[20] Josina W., "Urban people livelihood diversification: Strategy and sustainability", *American Journal of Economic and Management Business*, 4 (1), 2025: 911–925.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Faizal Rahmanto Moeis, Teguh Dartanto, Jossy Prananta Moeis, dan Mohamad Ikhsan berjudul *"A Longitudinal Study of Agriculture Households in Indonesia: The Effect of Land and Labor Mobility on Welfare and Poverty Dynamics".*[21] Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif longitudinal dengan memanfaatkan tiga gelombang Indonesia *Family Life Survey (IFLS)* tahun 2000, 2007, dan 2014 terhadap rumah tangga pertanian di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak mobilitas tenaga kerja keluar dari sektor pertanian serta perubahan kepemilikan lahan terhadap kesejahteraan dan dinamika kemiskinan rumah tangga pertanian. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Dual Sector Model dari Arthur Lewis yang menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern, serta pendekatan ekonomi pembangunan terkait transformasi struktural. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan metode quasi-experiment dengan *Difference-in-Differences (DiD)* dan *ordered logit regression* untuk menguji pengaruh mobilitas tenaga kerja dan penurunan lahan terhadap pengeluaran per kapita serta status kemiskinan (menggunakan garis kemiskinan $3.2 PPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode awal (2000–2007), perpindahan keluar dari sektor pertanian meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, namun pada periode berikutnya (2007–2014) efek tersebut tidak lagi signifikan, terutama bagi petani tak berlahan. Selain itu, penurunan kepemilikan lahan berdampak pada penurunan pengeluaran per kapita, menegaskan bahwa lahan tetap menjadi aset penting bagi kesejahteraan rumah tangga pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja saja tidak cukup menjamin peningkatan kesejahteraan tanpa didukung peningkatan modal manusia dan akses terhadap sektor formal.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Arifah, Darmawan Salman, Amir Yassi, dan Eymal Bahsar Demmallino berjudul *"Livelihood Vulnerability of*

[21] Faizal R. M., Teguh D., Jossy P. M., dkk., "A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics", *World Development Perspectives*, 20, 2020: 1–17.

Smallholder Farmers to Climate Change: A Comparative Analysis Based on Irrigation Access in South Sulawesi, Indonesia".[22] Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kerangka *Livelihood Vulnerability Index* (LVI) dan *Livelihood Vulnerability Index–Intergovernmental Panel on Climate Change* (LVI-IPCC) untuk mengukur tingkat kerentanan sistem penghidupan petani padi di wilayah irigasi Bettu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 132 rumah tangga petani yang dibedakan berdasarkan lokasi hulu dan hilir irigasi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kerentanan penghidupan akibat perubahan iklim dengan mempertimbangkan delapan komponen utama, yaitu strategi nafkah, profil sosiodemografis, jaringan sosial, pangan, air, lahan, kesehatan, serta bencana alam dan variabilitas iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di wilayah hilir lebih rentan dibandingkan wilayah hulu, terutama pada komponen strategi nafkah, ketersediaan air, kondisi lahan, serta frekuensi kejadian kekeringan. Sub-komponen seperti rendahnya diversifikasi nafkah pertanian, ketidakstabilan pasokan air, dan kejadian kekeringan menjadi faktor dominan peningkat kerentanan. Temuan ini menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya, khususnya irigasi dan kepemilikan lahan, sangat menentukan kapasitas adaptif petani dalam menghadapi tekanan perubahan iklim.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Wenjia Peng, Brian E. Robinson, Hua Zheng, Cong Li, Fengchun Wang, dan Ruonan Li berjudul *"Telecoupled Sustainable Livelihoods in an Era of Rural–Urban Dynamics: The Case of China"*[23] yang dipublikasikan dalam jurnal *Sustainability* tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi tinjauan *(review)* yang menggunakan pengembangan kerangka *Sustainable Livelihood Framework* yang dimodifikasi dengan pendekatan *telecoupling* untuk menganalisis dinamika strategi nafkah rumah tangga dalam konteks transformasi desa–

[22] Arifaha, Darmawan S., Amir Y., dkk., "Livelihood vulnerability of smallholder farmers to climate change: A comparative analysis based on irrigation access in South Sulawesi, Indonesia", *Regional Sustainability*, 3, 2022: 244–253.

[23] Wenjia P., Brian E. R., Hua Z., dkk., "Telecoupled sustainable livelihoods in an era of rural–urban dynamics: The case of China", *Sustainability*, 11, 2019: 1–17.

kota di Tiongkok. Fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mendorong perubahan strategi nafkah rumah tangga pedesaan, hubungan timbal balik antara wilayah rural dan urban melalui aliran tenaga kerja, modal, jasa ekosistem, serta peran kebijakan dalam membentuk keberlanjutan penghidupan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan konsep *telecoupled sustainable livelihoods* yang menekankan keterkaitan lintas wilayah *(rural–urban linkages)*, diversifikasi mata pencaharian, migrasi tenaga kerja, serta interaksi antara modal fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan dalam konteks urbanisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversifikasi nafkah dan migrasi desa–kota cenderung mengurangi ketergantungan langsung terhadap sumber daya alam, namun pada saat yang sama memunculkan dinamika baru berupa pergeseran tekanan lingkungan ke wilayah lain. Temuan ini menegaskan bahwa strategi nafkah rumah tangga tidak dapat dipahami secara lokal semata, melainkan harus dianalisis dalam konteks hubungan spasial yang lebih luas untuk mencapai keberlanjutan penghidupan dan keseimbangan ekologis.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Ngoc Ninh Ho, Phuong Thao Lai, Thi Cam Anh Truong, Van Hung Hoang, Thi Thuy Do, dan Thuy Nguyen berjudul *"The Contribution of Livelihood Diversification Activities to Poverty Reduction of Ethnic Minority Households: A Case Study in Son La Province, Vietnam"*.[24] Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data survei terhadap 240 rumah tangga etnis minoritas melalui teknik three-stage sampling di Provinsi Son La, Vietnam. Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi diversifikasi mata pencaharian serta menguji kontribusi diversifikasi tersebut terhadap pengurangan kemiskinan multidimensi. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (DFID) yang menekankan pada lima aset penghidupan (modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial), serta mengukur tingkat diversifikasi dengan *Simpson Diversification Index (SID)*. Metode analisis yang

[24] Ngoc N. H., Phuong T. L., Thi C. A. T., dkk., "The contribution of livelihood diversification activities to poverty reduction of ethnic minority households: A case study in Son La Province, Vietnam", *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8 (6), 2024: 1–24.

digunakan meliputi model Tobit untuk mengidentifikasi determinan diversifikasi dan *Linear Probability Model (LPM)* dengan pendekatan *instrumental variable* untuk menguji pengaruhnya terhadap status kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi mata pencaharian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas rumah tangga menjadi miskin, yang berarti semakin beragam sumber nafkah, semakin besar peluang keluar dari kemiskinan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, ukuran tenaga kerja, akses kredit, pelatihan vokasional, partisipasi dalam organisasi sosial, serta dukungan kebijakan pemerintah terbukti mendorong diversifikasi penghidupan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aset dan akses terhadap peluang non-pertanian menjadi strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan rumah tangga etnis minoritas secara berkelanjutan.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Dereje Kebede dan Girmay Tesfay berjudul *"Impact of Land Acquisition for Large-Scale Agricultural Investments on Income and Asset Possession of Displaced Households in Ethiopia"*.[25] Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental melalui metode *Propensity Score Matching (PSM)* dan *Inverse Probability Treatment Weighting (IPTW)* untuk menganalisis dampak pengambilalihan lahan skala besar terhadap kondisi pendapatan dan kepemilikan aset rumah tangga yang terdampak di distrik Adamitulu dan Dugda, Ethiopia. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 255 rumah tangga terdampak dan 266 rumah tangga pembanding (non-terdampak), serta dilengkapi dengan FGD. Fokus penelitian ini adalah mengukur perbedaan pendapatan tahunan dan kepemilikan aset produktif antara kedua kelompok akibat proses dislokasi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga terdampak mengalami penurunan pendapatan tahunan rata-rata sebesar 72 persen dibandingkan kelompok non-terdampak, serta penurunan signifikan pada kepemilikan ternak dan aset produktif. Temuan ini menegaskan bahwa pengambilalihan lahan untuk investasi pertanian skala

[25] Dereje K., Girmay T., Bezabih E., "Impact of land acquisition for large-scale agricultural investments on income and asset possession of displaced households in Ethiopia", *Heliyon*, 7, 2021: 1–13.

besar justru memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga kecil, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih protektif terhadap keberlanjutan nafkah kelompok terdampak.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kelompok Tani

Kelompok tani pada dasarnya tumbuh dari inisiatif bersama para petani yang merasa memiliki kebutuhan dan tantangan serupa dalam menjalankan kegiatan pertanian mereka sehari-hari. Entitas ini dapat dipahami sebagai sebuah organisasi sosial yang pembentukannya didasarkan pada kedekatan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, serta kebutuhan kolektif yang dirasakan oleh seluruh anggotanya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan definisi resmi terkait kelompok tani melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, yang menyebutkan bahwa kelompok tani adalah himpunan para petani, peternak, maupun pekebun yang bersatu karena adanya kesamaan dalam hal kepentingan, kondisi lingkungan sosial-ekonomi, sumber daya yang dimiliki, komoditas yang diusahakan, serta kedekatan hubungan antarindividu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha bersama.[26] Lebih dari sekadar wadah produksi, kelompok tani juga berfungsi sebagai ruang sosial tempat para anggotanya saling berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan, maupun sumber daya yang mereka miliki secara bergantian. Dengan posisi tersebut, kelompok tani memegang peranan yang cukup strategis dalam memperkuat daya tawar petani, baik ketika berhadapan dengan mekanisme pasar maupun dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak di luar komunitas mereka, sehingga kehadirannya menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam keseluruhan ekosistem pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan.

[26] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Dalam berbagai kajian mengenai pembangunan pertanian, kelompok tani secara konsisten dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam proses modernisasi sektor pertanian sekaligus sebagai sarana efektif dalam meningkatkan taraf hidup para petani secara menyeluruh. Mosher dalam pemikirannya yang banyak dirujuk oleh para akademisi pembangunan pertanian menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani yang tertata dan berjalan secara fungsional merupakan prasyarat mendasar bagi berlangsungnya pembangunan pertanian yang efektif.[27] Di samping itu, kelompok tani juga berperan sebagai penghubung antara petani dengan berbagai institusi seperti pemerintah daerah, lembaga penyuluhan pertanian, dan lembaga keuangan, sehingga peluang untuk mengakses berbagai program dukungan maupun teknologi pertanian terbaru dapat lebih terbuka bagi seluruh anggotanya. Pada akhirnya, kehadiran kelompok tani memberikan dampak tidak langsung yang cukup berarti dalam mempersempit ketimpangan akses sumber daya antara petani kecil dengan pelaku usaha pertanian yang jauh lebih besar dan lebih mapan dari segi ekonomi.

Setidaknya terdapat tiga fungsi pokok kelompok tani yang perlu dipahami secara mendalam. Fungsi pertama adalah sebagai kelas belajar, di mana kelompok tani menyediakan ruang bagi para anggotanya untuk secara bersama-sama meningkatkan kapasitas diri, baik dari sisi pengetahuan, kecakapan teknis, maupun sikap dalam mengelola usaha tani, sehingga setiap inovasi pertanian yang muncul dapat lebih mudah diserap dan diterapkan secara terencana. Fungsi kedua adalah sebagai wahana kerja sama, yakni kelompok tani menjadi arena untuk mempererat sinergi di antara para petani, baik dalam internal kelompok itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan kelompok lain dan berbagai pihak eksternal seperti penyuluh, pedagang, serta pemerintah setempat, yang semuanya bergerak dalam satu sistem yang saling menopang. Fungsi ketiga adalah sebagai unit produksi, di mana kelompok tani diperlakukan sebagai satu kesatuan usaha yang apabila dikelola dengan baik dapat

[27] Arthur T. Mosher, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization* (New York: Frederick A. Praeger, 1966), hlm. 47–55.

mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, baik dari sisi peningkatan volume produksi maupun dari sisi efisiensi pengeluaran biaya pertanian.[28] Keberadaan ketiga fungsi tersebut secara kolektif membuktikan bahwa kelompok tani jauh melampaui sekadar perkumpulan biasa, melainkan merupakan entitas terorganisir yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menopang keberlangsungan mata pencaharian anggotanya di tengah berbagai dinamika perubahan sosial yang terus bergerak.

Selain ketiga fungsi di atas, kelompok tani juga ditandai oleh sejumlah ciri khas yang membedakannya dari bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya yang ada di masyarakat. Mardikanto mencatat bahwa kelompok tani pada umumnya bersifat informal dalam arti bahwa pembentukannya bukan hasil dari intervensi atau paksaan pihak luar, melainkan tumbuh secara organik dari kesadaran dan kebutuhan bersama para anggotanya, sehingga ikatan sosial yang terjalin di dalamnya cenderung lebih tulus dan kuat.[29] Kedekatan geografis antaranggota juga menjadi salah satu ciri yang menonjol, sebab tinggal di lingkungan yang berdekatan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam mengelola kegiatan pertanian secara kolektif tanpa hambatan jarak yang berarti. Selain itu, kesamaan jenis usaha tani yang digeluti oleh para anggota turut menjadi perekat penting, karena tantangan dan kebutuhan yang serupa mendorong tumbuhnya solidaritas yang lebih kokoh di antara mereka. Struktur kepemimpinan dalam kelompok tani pun umumnya bersifat demokratis, di mana figur pemimpin dipilih berdasarkan kepercayaan kolektif anggota terhadap kemampuannya dalam merepresentasikan kepentingan bersama. Ciri-ciri inilah yang pada saat bersamaan juga menjadikan kelompok tani sebagai entitas yang rentan ketika dihadapkan pada tekanan eksternal yang bersifat mendadak, seperti penggusuran, relokasi paksa, atau perubahan drastis dalam tata ruang yang dipicu oleh proyek pembangunan berskala besar.

---

[28] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

[29] Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1993), hlm. 72–74.

Dalam perkembangan yang lebih kontemporer, praktik pertanian telah mengalami perluasan makna yang melampaui batas-batas kawasan pedesaan dan mulai merambah ke wilayah perkotaan dalam wujud yang dikenal luas sebagai *urban farmer* atau petani kota. Petani kota *(urban farmer)* merupakan aktor sentral dalam ekosistem pertanian perkotaan yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari petani yang hidup dan bekerja di pedesaan. Petani kota umumnya tidak menempatkan kegiatan bertani sebagai satu-satunya tumpuan ekonomi rumah tangga, melainkan mengintegrasikannya ke dalam strategi nafkah yang lebih luas, di mana berbagai sumber pendapatan lain baik dari sektor formal maupun informal dijalankan secara bersamaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.[30] Kondisi keterbatasan lahan di lingkungan perkotaan juga memaksa petani kota untuk bersikap adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan ruang-ruang sempit yang tersedia, sehingga produktivitas pertanian mereka tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai sumber penghasilan yang mencukupi. Kondisi semacam ini menempatkan petani kota pada posisi sosiologis yang unik, yakni sebagai kelompok yang harus secara terus-menerus menegosiasikan identitas gandanya sebagai petani sekaligus pekerja urban di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang semakin kompetitif dari waktu ke waktu. Mougeot menambahkan bahwa praktik pertanian yang dijalankan oleh komunitas-komunitas semacam ini sejatinya tidak semata-mata berorientasi pada dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung fungsi sosial yang penting dalam mempererat kohesi di antara sesama anggota komunitas serta dalam menjaga keberlangsungan identitas kultural kelompok di tengah derasnya perubahan wajah kota.[31]

Relevansi konsep pertanian kota menjadi semakin nyata dan penting ketika digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami kondisi yang dihadapi oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani setelah mereka menempati Rusun HPPO.

---

[30] Frimpong Abass K., Ohene-Yankyera K., Al-Hassan R. M., "Urban sprawl and agricultural livelihood response in peri-urban Ghana", *Urban Agriculture & Regional Food Systems*, 4 (1), 2019: 1–13. https://doi.org/10.1080/19463138.2019.1691560

[31] Luc J. A. Mougeot, *Growing Better Cities: Urban Agriculture for Sustainable Development* (Ottawa: International Development Research Centre, 2006), hlm. 14–16.

Komunitas ini merupakan gambaran konkret dari para petani kota yang berjuang untuk tetap mempertahankan tradisi bertani mereka di tengah-tengah perubahan ruang hidup yang tidak mereka pilih sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari proyek pembangunan perkotaan berskala besar. Meskipun pemerintah telah berupaya mengakomodasi identitas mereka sebagai petani dengan menyediakan lahan pertanian di kawasan rusun, keterbatasan skala produksi yang tersedia menjadikan hasil dari kegiatan bertani tersebut belum memadai untuk menanggung seluruh kebutuhan ekonomi rumah tangga para anggota kelompok. Akibatnya, sebagian besar anggota komunitas ini terpaksa menggantungkan hidup pada pekerjaan-pekerjaan lain di luar sektor pertanian, seperti menjadi kuli panggul, berdagang kecil-kecilan, maupun menjalani berbagai pekerjaan serabutan lainnya, sebagai strategi pragmatis untuk bertahan di tengah kehidupan perkotaan yang penuh ketidakpastian.

1.6.2 Rumah Susun (Rusun)

Secara terminologis, pengertian rumah susun di Indonesia dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam Pasal 1 Ayat (1) regulasi tersebut dinyatakan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.[32] Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa elemen pokok yang menjadi ciri khas rumah susun sebagai bentuk hunian vertikal, yakni pertama, dimensi fisik yang merujuk pada bangunan bertingkat yang terstruktur secara fungsional baik secara horizontal maupun vertikal; kedua, dimensi individual yang menyangkut hak atas satuan unit hunian yang dapat dimiliki atau digunakan secara terpisah oleh masing-masing penghuni; dan ketiga, dimensi

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

kolektif yang mencerminkan keberadaan bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama yang menjadi hak dan tanggung jawab seluruh penghuni secara komunal. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga menghuni rumah susun berarti menempatkan diri dalam sebuah sistem hunian yang menuntut keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab kolektif secara bersamaan. Pemahaman atas elemen-elemen ini penting sebagai landasan untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam komunitas penghuni rusun, termasuk kelompok tani yang menjadi subjek penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 lebih lanjut mengklasifikasikan rumah susun ke dalam empat jenis berdasarkan fungsi dan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Keempat jenis tersebut adalah sebagai berikut:[33]

1. **Rumah Susun Umum**

   Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis ini merupakan yang paling banyak dibangun oleh pemerintah dan menjadi instrumen utama dalam program penyediaan hunian terjangkau di berbagai kota besar.

2. **Rumah Susun Khusus**

   Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dari masyarakat umum, seperti penampungan pengungsi, pekerja dengan kebutuhan hunian spesifik, maupun komunitas dengan latar belakang sosial-ekonomi tertentu.

3. **Rumah Susun Negara**

   Rumah susun yang dimiliki dan dikelola oleh negara, berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri.

---

[33] *Ibid.*

4. Rumah Susun Komersial

Rumah susun yang diselenggarakan dengan orientasi memperoleh keuntungan dan umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas melalui mekanisme pasar properti yang dikembangkan oleh swasta.

Dalam konteks penelitian ini, HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional) di area Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Jakarta Utara, secara fungsional paling mendekati kategori rumah susun khusus. Hal ini dikarenakan HPPO diperuntukkan bagi kelompok spesifik, yakni para pekerja pendukung operasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas kawasan JIS, termasuk kelompok tani yang sebelumnya menempati lahan di sekitar area tersebut. Pemahaman atas posisi HPPO dalam klasifikasi yuridis ini menjadi penting karena menentukan mekanisme pengelolaan, skema penghunian, serta hak dan kewajiban penghuninya, termasuk tersedianya fasilitas komunal seperti lahan pertanian yang disediakan sebagai bentuk akomodasi atas kebutuhan spesifik kelompok tani yang menempatinya.

Secara konseptual, pemahaman tentang perumahan dalam perspektif akademis tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritis yang panjang mengenai makna dan fungsi hunian bagi penghuninya. John F. C. Turner dalam esainya yang berpengaruh, *"Housing as a Verb"*, yang dimuat dalam buku *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*, membedakan dua cara memandang perumahan, yakni perumahan sebagai kata benda *(noun)* dan perumahan sebagai kata kerja *(verb)*.[34] Memandang perumahan sebagai kata benda berarti menempatkannya semata sebagai produk atau komoditas fisik yang dapat diukur, dinilai, dan ditransaksikan. Sebaliknya, memandang perumahan sebagai kata kerja berarti memahaminya sebagai sebuah proses yang hidup dan dinamis, yang mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kapasitas penghuninya secara aktif. Turner menegaskan bahwa yang terpenting dari sebuah hunian bukanlah apa yang ia miliki secara fisik, melainkan apa yang ia lakukan bagi penghuninya, dalam

[34] John F. C. Turner, "Housing as a Verb," dalam *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*, ed. John F. C. Turner dan Robert Fichter (New York: Collier Macmillan, 1972), hlm. 148–175.

artian sejauh mana hunian tersebut mampu mendukung dan memfasilitasi kehidupan, produktivitas, dan kesejahteraan orang-orang yang menghuninya. Perspektif ini menjadi relevan untuk memahami kondisi kelompok tani di HPPO, di mana hunian yang secara fisik telah disediakan oleh pemerintah perlu dievaluasi lebih jauh dari sisi kemampuannya dalam mendukung keberlanjutan penghidupan komunitas yang menghuninya.

Lebih jauh, Persoalan rumah susun sebagai instrumen kebijakan perumahan juga menyentuh dimensi kualitas hunian yang layak sebagai hak dasar warga negara. Kuswartojo dalam bukunya "Perumahan dan Pemukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan" menjelaskan bahwa kualitas perumahan tidak dapat diukur dari standar fisik bangunan semata, melainkan harus mencakup lokasi dalam struktur kota yang mencakup keterjangkauan terhadap tempat kerja, fasilitas sosial, dan transportasi, serta kemampuan hunian dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial penghuninya secara berkelanjutan.[35] Pandangan ini menggarisbawahi bahwa perumahan yang baik adalah perumahan yang secara holistik mampu mengakomodasi kebutuhan penghuninya, bukan semata hunian yang memenuhi standar fisik minimal. Dalam konteks HPPO, ketersediaan lahan pertanian komunal yang difasilitasi pemerintah dapat dibaca sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan sosial kelompok tani agar hunian yang disediakan tidak semata memenuhi fungsi fisik sebagai tempat berlindung, tetapi juga mampu mendukung keberlangsungan mata pencaharian komunitas yang menempatinya.

Adapun dari sisi tata kelola dan pengelolaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengatur bahwa penyelenggaraan rumah susun mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu,

---

[35] Tjuk Kuswartojo, *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan* (Bandung: Penerbit ITB, 2005), hlm. 10.

berkelanjutan, dan bertanggung jawab.[36] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun bukan semata urusan teknis administratif, melainkan mencakup dimensi partisipasi dan peran serta masyarakat yang menjadi elemen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan hunian vertikal. Keterlibatan aktif penghuni dalam proses pengelolaan rusun sangat relevan untuk diperhatikan, terutama dalam konteks komunitas yang memiliki tradisi gotong royong dan pengelolaan sumber daya secara kolektif seperti kelompok tani, yang kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan sistem pengelolaan rusun yang lebih formal dan birokratis menjadi salah satu tantangan tersendiri pasca relokasi.

1.6.3 *Sustainable Livelihood Framework*

Dalam perkembangan kajian pembangunan dan kemiskinan, *Sustainable Livelihood Framework (SLF)* hadir sebagai sebuah kerangka analitis yang pertama kali digagas oleh Robert Chambers dan Gordon Conway di awal dekade 1990-an. Kerangka ini kemudian mendapatkan perhatian yang jauh lebih luas setelah diadopsi dan dikembangkan secara sistematis oleh *Department for International Development (DFID)* menjelang akhir abad ke-20. Gagasan mendasar yang melatarbelakangi lahirnya kerangka ini adalah ketidakpuasan terhadap cara-cara konvensional dalam melihat persoalan kemiskinan yang terlalu bertumpu pada ukuran pendapatan semata, seolah-olah kemiskinan hanya bisa diselesaikan melalui intervensi ekonomi tanpa memperhatikan dimensi sosial, ekologis, dan struktural yang turut membentuk kehidupan seseorang. SLF menawarkan perspektif yang menempatkan manusia beserta seluruh kapasitas dan potensinya sebagai titik berangkat analisis, sehingga penghidupan tidak hanya dipahami dari sudut materi tetapi juga dari sisi relasi sosial, kondisi lingkungan, dan struktur kelembagaan yang mengitarinya.[37]

---

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 1 ayat (2).
[37] Robert Chambers dan Gordon R. Conway, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century* (Brighton: Institute of Development Studies, 1991).

Chambers dan Conway merumuskan pengertian penghidupan (*livelihood*) sebagai suatu kombinasi antara kemampuan, aset, dan aktivitas yang secara bersama-sama dibutuhkan seseorang untuk bisa menjalani kehidupannya dengan layak. Lebih jauh, penghidupan disebut berkelanjutan apabila seseorang atau kelompok mampu bertahan dan bangkit dari berbagai tekanan maupun guncangan yang datang silih berganti, sekaligus mampu menjaga agar aset dan kemampuan yang dimilikinya tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu, baik untuk generasi yang hidup saat ini maupun generasi yang akan datang. Definisi ini membawa implikasi penting bahwa keberlanjutan penghidupan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya pekerjaan, melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana seseorang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan bertahan dalam jangka panjang di tengah kondisi yang terus berubah.

Keberlanjutan dalam pengertian ini juga mencakup dimensi lintas generasi, artinya sebuah strategi penghidupan baru dapat dikatakan benar-benar berkelanjutan apabila tidak hanya menguntungkan mereka yang menjalaninya saat ini, tetapi juga tidak menutup peluang bagi generasi penerus untuk memiliki penghidupan yang setara atau lebih baik. Bagi komunitas yang mengalami perpindahan tempat tinggal secara mendadak seperti kelompok tani ini, rumusan tersebut memberikan lensa yang sangat tepat untuk membaca bagaimana mereka menyusun ulang strategi hidupnya di lingkungan yang baru, terlebih ketika sebagian besar anggota kelompok tani tidak hanya menggantungkan hidup pada satu sumber penghasilan, tetapi menjalani berbagai jenis pekerjaan informal sebagai bagian dari upaya bertahan.[38]

[38] *Ibid.*, hlm. 6-7.

Skema 1. 2 *Sustainable Livelihood Framework*

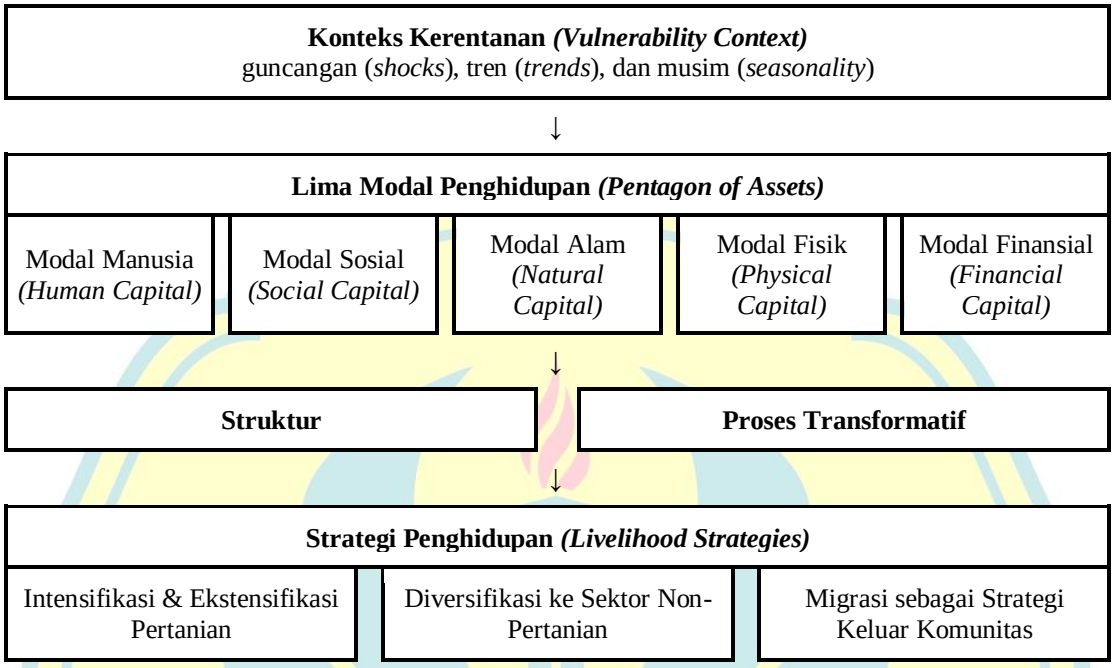

Sumber : Olah data peneliti, 2026

Sebelum membahas lebih jauh komponen-komponen SLF, penting untuk dipahami terlebih dahulu konsep *vulnerability context* atau konteks kerentanan yang menjadi latar belakang keseluruhan kerangka ini. Konteks kerentanan menggambarkan kondisi eksternal yang berada di luar kendali individu atau kelompok namun memberikan pengaruh yang nyata terhadap aset dan strategi penghidupan mereka. Berikut ini terdapat tiga sumber utama kerentanan, yaitu guncangan (*shocks*), tren (*trends*), dan musim (*seasonality*). Guncangan diartikan sebagai peristiwa mendadak yang secara tiba-tiba mengancam atau mengurangi aset penghidupan suatu komunitas. Tren merupakan tekanan yang berlangsung secara gradual dalam jangka panjang dan membentuk kondisi makro di mana penghidupan suatu komunitas berlangsung. Sementara musim merupakan pola ketidakstabilan yang berulang secara siklikal, baik

yang berkaitan dengan musim pertanian, fluktuasi harga, maupun perubahan permintaan pasar dalam periode tertentu..[39]

Inti dari SLF terletak pada lima komponen aset penghidupan (*livelihood assets* atau *pentagon of assets*) yang saling berkaitan dan menjadi modal dasar bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan strategi penghidupannya. Kelima aset tersebut adalah sebagai berikut:[40]

1) **Modal Manusia *(Human Capital):*** Modal manusia mencakup segala kapasitas yang melekat pada diri individu, mulai dari pengetahuan dan keterampilan teknis, kondisi fisik dan kesehatan, hingga kemampuan mengambil keputusan yang produktif dan bernilai secara ekonomi.
2) **Modal Sosial *(Social Capital):*** Modal sosial merujuk pada keseluruhan jaringan hubungan, ikatan kepercayaan, norma timbal balik, dan keanggotaan dalam kelompok yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk memperluas peluang sekaligus mengurangi beban hidupnya.
3) **Modal Alam *(Natural Capital)*:** Modal alam mencakup seluruh sumber daya yang berasal dari alam dan menjadi basis bagi aktivitas penghidupan, seperti tanah pertanian, sumber air, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem yang menopang kehidupan.
4) **Modal Fisik *(Physical Capital)*:** Modal fisik meliputi sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan aktivitas sehari-hari, seperti kondisi hunian, akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, sarana transportasi, dan peralatan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas produktif.
5) **Modal Finansial *(Financial Capital):*** Modal finansial berkenaan dengan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk mendanai pilihan-pilihan strategi

---

[39] Chambers R., "Vulnerability, coping and policy", *IDS Bulletin*, 20 (2), 1989: 1–7. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1989.mp20002001.x

[40] Department for International Development (DFID), *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets* (London: Department for International Development, 1999).

penghidupan ke depan, termasuk tabungan, akses terhadap kredit, kepemilikan aset yang dapat dilikuidasi, serta arus pendapatan rutin dari berbagai sumber.

Lima modal penghidupan tersebut tidak bekerja secara terpisah dari konteks yang lebih besar. Keseluruhannya berada dalam pengaruh apa yang oleh DFID disebut sebagai struktur dan proses transformatif *(transforming structures and processes)*. Struktur dalam hal ini mencakup berbagai tingkatan tata kelola, mulai dari pemerintah di semua level, organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, hingga lembaga-lembaga adat dan tradisional. Sementara itu, proses merujuk pada perangkat aturan dan kebijakan yang mengatur bagaimana struktur-struktur tersebut berfungsi, termasuk di dalamnya regulasi hukum, kebijakan publik, dan penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat. Scoones menegaskan bahwa struktur dan proses ini merupakan faktor penentu yang sangat krusial karena keduanya menentukan aturan main di mana strategi penghidupan dijalankan. Dalam kasus Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Jakarta International Stadium (JIS) dan merelokasi warga merupakan contoh nyata bagaimana proses transformatif mampu mengubah lanskap penghidupan suatu komunitas secara menyeluruh dan dalam waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, kebijakan penyediaan lahan pertanian di kawasan HPPO juga merupakan respons struktural yang mencerminkan adanya upaya untuk mempertahankan karakter dan mata pencaharian komunitas tani tersebut, meskipun pertanyaan tentang seberapa jauh respons ini benar-benar memadai tetap perlu dikaji secara mendalam.

Scoones lebih lanjut mengidentifikasi tiga jenis strategi penghidupan yang umum ditemukan di kalangan masyarakat yang sedang dalam proses adaptasi terhadap perubahan kondisi hidup, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian, serta migrasi. Pada banyak kasus, ketiga strategi ini tidak berjalan secara eksklusif, melainkan dijalankan secara bersamaan atau bergantian tergantung pada kondisi yang dihadapi.

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian dalam Keterbatasan Lahan

Strategi ini dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan hasil panen per satuan lahan, adopsi teknologi pertanian baru, dan perluasan areal tanam, di mana intensifikasi berfokus pada peningkatan produktivitas lahan yang ada melalui tambahan modal dan input eksternal, sementara ekstensifikasi lebih mengandalkan tenaga kerja sendiri dan sumber daya sosial yang tersedia.

2) **Diversifikasi Mata Pencaharian ke Sektor Non-Pertanian**

Strategi ini dapat bersifat aktif, yakni sebagai pilihan strategis untuk membangun portofolio pendapatan yang luas agar mampu menyerap berbagai guncangan, maupun bersifat responsif sebagai mekanisme bertahan ketika sumber penghasilan utama terganggu atau gagal, dengan indikatornya meliputi jumlah sumber pendapatan, tingkat keterlibatan dalam sektor non-pertanian, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok.

3) **Migrasi sebagai Strategi Keluar dari Komunitas**

Dinamika migrasi terjadi dalam dua arah yang berlawanan, yaitu keluarnya anggota yang memilih untuk tidak melanjutkan perjuangan bersama komunitas, dan kembalinya beberapa anggota yang sebelumnya telah meninggalkan komunitas namun kemudian menyesal dan meminta untuk bergabung kembali.

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara tiga konsep utama, yaitu Rumah Susun, Kelompok Tani, dan *Sustainable Livelihood Framework*, beserta dimensi-dimensi yang terdapat di dalam masing-masing konsep tersebut. Setiap konsep memiliki beberapa dimensi turunan yang saling berkaitan satu sama lain, baik di dalam konsepnya sendiri maupun lintas konsep, sehingga membentuk satu kesatuan pemahaman yang menyeluruh dalam menjawab permasalahan penelitian.

Skema 1. 3 **Hubungan Antar Konsep**

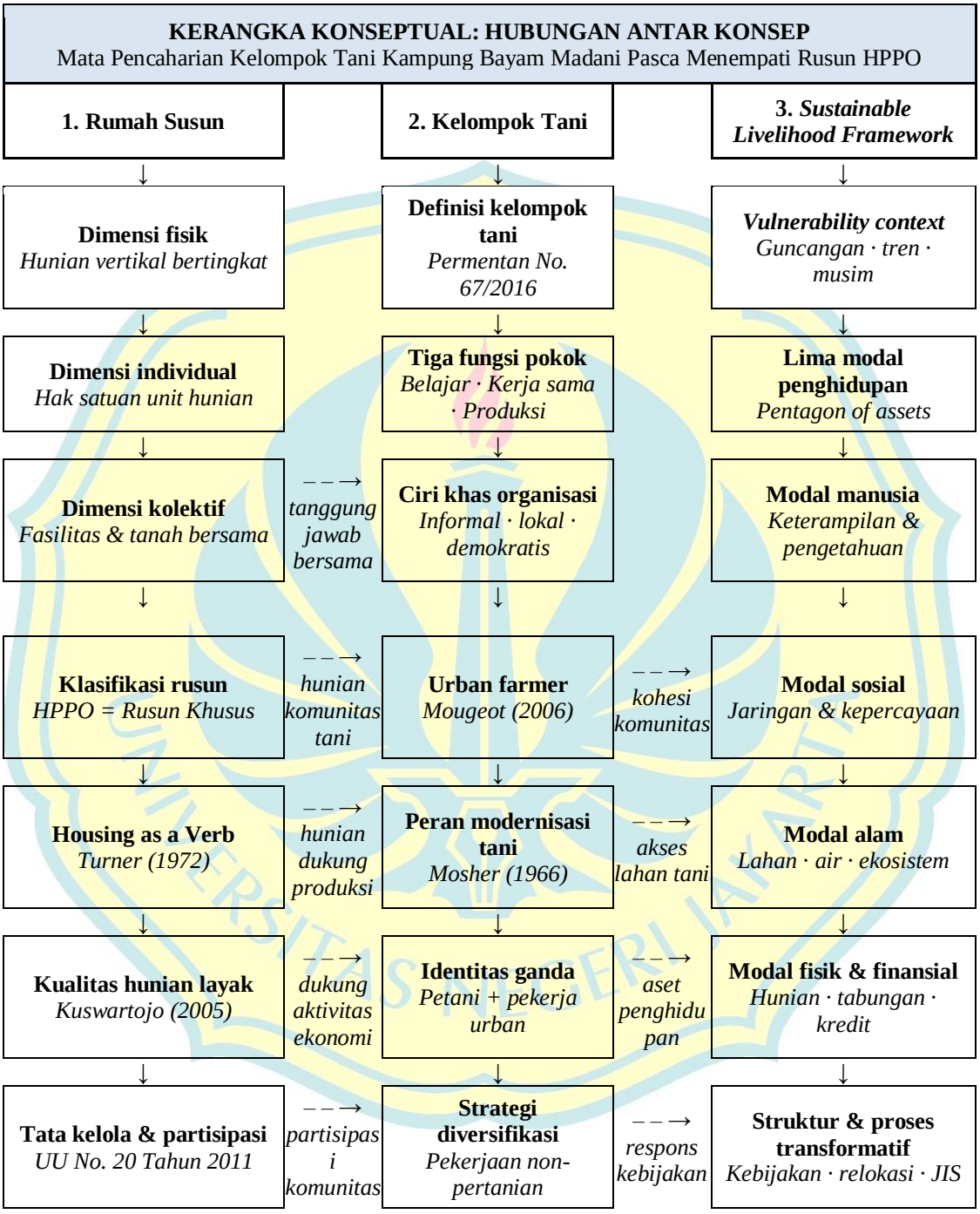

Keterangan: – – → menunjukkan keterkaitan antar konsep lintas kolom

Sumber : Olah data peneliti, 2026

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perubahan mata pencaharian kelompok tani pasca menempati Rusun HPPO di area JIS, Papanggo, Jakarta Utara, yaitu sebuah fenomena sosial yang tidak cukup hanya diukur secara numerik, melainkan perlu dipahami secara kontekstual melalui pengalaman, makna, dan perspektif para pelakunya. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial, di mana peneliti berperan aktif di lapangan, mengumpulkan data secara reflektif, dan menyajikannya secara naratif dan mendetail.[41]

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berposisi sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi serta analisis yang bersifat induktif.[42] Pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mengkaji secara spesifik dan mendalam satu kasus tunggal yang khas, yakni Kelompok Tani Kampung Bayam Madani sebagai komunitas tani yang mengalami relokasi dan kini menghuni Rusun HPPO, dengan segala kompleksitas perubahan sosial dan ekonomi yang menyertainya. Melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti berharap dapat menghasilkan deskripsi yang kaya dan analisis yang komprehensif tentang bagaimana mata pencaharian kelompok tani ini bertransformasi dalam konteks kehidupan perkotaan yang baru.

---

[41] John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi utama dan dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan penelitian ini secara mendalam. Penelitian ini menetapkan 8 (delapan) informan yang dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang dipilih karena memiliki pemahaman menyeluruh terhadap dinamika internal kelompok serta sejarah proses relokasi dari Kampung Bayam hingga menempati Rusun HPPO. Kedua, anggota kelompok tani yang sepenuhnya berfokus pada kegiatan bertani di lahan HPPO, guna memperoleh gambaran mendalam mengenai pola pertanian yang dijalani. Ketiga, anggota kelompok tani yang memiliki pekerjaan lain di luar bertani sebagai mata pencaharian tambahan, seperti kuli bangunan, montir, pemilik warung makan, maupun pelaku usaha olahan hasil tani, guna mendapatkan gambaran diversifikasi mata pencaharian yang sesungguhnya. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Tabel 1. 1 Subjek Penelitian

No.	Nama	Usia	Kategori	Mata Pencaharian
1	MF	48 Tahun	Ketua Kelompok Tani	Petani
2	TS	55 Tahun	Anggota Kelompok Tani (Fokus Bertani)	Petani
3	T	40 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani dan Kuli Bangunan
4	O	40 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani dan Montir Bengkel
5	H	50 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani dan Pemilik Warung Makan

No.	Nama	Usia	Kategori	Mata Pencaharian
6	K	40 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani dan Kuli Bangunan
7	N	46 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani, Pelaku usaha olahan hasil tani, dan Serabutan (Cuci Gosok, Menjahit)
8	Y	26 Tahun	Anggota Kelompok Tani (dengan Pekerjaan Sampingan)	Petani dan Pelaku usaha olahan hasil tani

Sumber : Olah data peneliti, 2026

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Rusun HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional) yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Kawasan hunian tersebut berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Jakarta International Stadium (JIS), yang pembangunannya menjadi latar belakang langsung dari proses relokasi yang dialami oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Alasan pemilihan lokasi ini tidak terlepas dari keunikan Rusun HPPO sebagai satu-satunya hunian yang secara khusus menampung komunitas tani terdampak, sekaligus menyediakan fasilitas lahan pertanian komunal sebagai bagian dari upaya mengakomodasi kebutuhan penghuninya. Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini sangat tepat untuk dijadikan studi kasus dalam mengkaji perubahan dan keberlangsungan mata pencaharian kelompok tani secara mendalam. Adapun pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan, terhitung sejak Januari hingga April 2026, dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut memberikan ruang yang cukup bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang memadai dan membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

1.7.4 Peran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses penelitian dari awal hingga akhir. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu merancang fokus kajian, menyusun kerangka konseptual, serta mempersiapkan instrumen pengumpulan data yang disesuaikan dengan karakteristik subjek dan lokasi penelitian. Ketika berada di lapangan, peneliti secara langsung menjalin komunikasi dengan para informan, melakukan pengamatan terhadap keseharian komunitas di Rusun HPPO, serta mencatat berbagai hal yang dianggap penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis, dan dimaknai oleh peneliti dengan mengacu pada kerangka *Sustainable Livelihood Framework* sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. Hasil dari keseluruhan proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi satu sama lain. Secara garis besar, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai bahan penguat terhadap temuan-temuan di lapangan. Kombinasi dari berbagai teknik tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan berlapis, sehingga tidak cukup apabila hanya dilihat dari satu sudut pandang atau satu sumber data saja. Keanekaragaman teknik pengumpulan data ini juga dimaksudkan agar gambaran mengenai kondisi mata pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pasca menempati Rusun HPPO dapat tersaji secara utuh dan mendalam. Dengan demikian,

setiap teknik yang digunakan memiliki fungsi dan kontribusinya masing-masing dalam membangun pemahaman peneliti terhadap fenomena yang sedang dikaji.

1.7.5.1 Observasi

Observasi menjadi teknik pertama yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Berbeda dari teknik lainnya, observasi memberikan kesempatan peneliti untuk menyaksikan secara langsung berbagai aktivitas, kondisi lingkungan, dan dinamika sosial yang terjadi di Rusun HPPO tanpa bergantung sepenuhnya pada penuturan informan. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana keseharian anggota kelompok tani dijalani, termasuk aktivitas bertani di lahan komunal, rutinitas pekerjaan sehari-hari, dan pola interaksi antarpenghuni rusun. Seluruh hasil pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan sebagai bahan analisis yang nantinya akan dipadukan dengan data dari teknik pengumpulan lainnya. Pendekatan observasi ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang mengedepankan keterlibatan peneliti secara langsung di lingkungan yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan autentik.[43]

1.7.5.2 Wawancara

Wawancara mendalam merupakan teknik utama kedua dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara menggali informasi secara langsung dari para informan yang telah dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan dua bentuk wawancara secara bersamaan, yaitu wawancara semi-terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawabannya secara lebih bebas dan terbuka. Pendekatan semi-terstruktur ini dipilih karena dinilai lebih fleksibel dan mampu menangkap pengalaman serta perspektif informan secara lebih kaya dibandingkan

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

wawancara yang sepenuhnya kaku dan terikat pada pedoman pertanyaan yang baku. Melalui wawancara dengan ketua kelompok tani, anggota aktif yang memiliki pekerjaan sampingan di luar bertani, anggota yang hanya berfokus pada kegiatan bertani, serta perwakilan LSM sebagai bagian dari triangulasi data, peneliti berharap dapat memperoleh informasi yang beragam dan saling melengkapi mengenai perubahan mata pencaharian yang dialami komunitas ini sejak menempati Rusun HPPO.

1.7.5.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai bahan pendukung dan penguat temuan lapangan. Dokumentasi mencakup berbagai bentuk rekaman seperti foto kondisi lingkungan rusun dan lahan pertanian, catatan kegiatan kelompok tani, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan proses relokasi dan kebijakan pengelolaan HPPO yang dapat diperoleh dari pihak pengelola maupun instansi terkait. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut dinilai penting untuk memberikan konteks historis dan kelembagaan yang tidak selalu dapat ditangkap melalui observasi maupun wawancara semata. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, regulasi perundang-undangan, serta pemberitaan media yang relevan dengan topik relokasi, mata pencaharian, dan *Sustainable Livelihood Framework*. Keseluruhan data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat keabsahan analisis serta memperluas cakrawala pemahaman peneliti dalam menginterpretasikan temuan yang diperoleh di lapangan.

1.7.6 Triangulasi Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dijaga melalui proses verifikasi dengan menggunakan triangulasi data, yaitu strategi untuk mengonfirmasi dan memperkuat temuan penelitian dengan membandingkan informasi dari berbagai

sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Indonesia Resilience (IRES) yang secara aktif mendampingi Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam terkait dinamika sosial, proses advokasi, serta kondisi kehidupan penghuni pasca relokasi ke Rusun HPPO. Adapun informan dari FPPI adalah Y sebagai Sekretaris Jenderal FPPI, serta dari IRES adalah HA sebagai mantan Direktur Eksekutif IRES. Informasi dari kedua LSM tersebut digunakan untuk mengonfirmasi dan melengkapi data yang diperoleh dari anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, sehingga temuan penelitian diharapkan menjadi lebih kredibel, objektif, dan mampu merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya pasca menempati Rusun HPPO.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur sejenis, kerangka konseptual (kelompok tani, rumah susun, dan *Sustainable Livelihood Framework* serta hubungan antar konsep), metodologi penelitian (pendekatan, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, serta triangulasi data), dan sistematika penulisan.

Bab II Konteks Sosial Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, pada bab ini menguraikan sejarah dan profil Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, kondisi sebelum dan sesudah relokasi, struktur komunitas, visi dan tujuan kelompok. Selain itu, deskripsi lokasi Rusun HPPO yang mencakup kondisi fisik, fasilitas penunjang, akses terhadap transportasi umum, serta status hukum dan kategorinya. Dilanjut

dengan pembahasan kehidupan sosial dan budaya pasca menempati rusun, serta profil informan penelitian.

Bab III Mata Pencaharian Kelompok Tani Pasca Menempati Rusun HPPO di Area JIS Papanggo Jakarta Utara, pada bab ini membahas perubahan struktur mata pencaharian pasca relokasi, kondisi pertanian sebelum dan sesudah relokasi, serta diversifikasi pekerjaan anggota kelompok tani. Selain itu, diuraikan berbagai jenis pekerjaan di luar sektor pertanian, pola pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, beban ekonomi baru, strategi penghematan, keterbatasan akses pasar, potensi pengembangan ekonomi seperti agrowisata, serta konteks kerentanan yang meliputi guncangan, tren, dan faktor musiman.

Bab IV Analisis Sustainable Livelihood Framework terhadap Mata Pencaharian Kelompok Tani Kampung Bayam Madani di Rusun HPPO, pada bab ini berisi analisis temuan penelitian menggunakan *Sustainable Livelihood Framework*, yang mencakup lima modal penghidupan (modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial), struktur dan proses yang memengaruhi kehidupan komunitas, serta strategi penghidupan yang dilakukan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pekerjaan, dan migrasi.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.